

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama sepuluh tahun terakhir, dinamika ekonomi global telah dihadapkan pada berbagai isu kompleks, khususnya terkait dengan dinamika kebijakan fiskal dan moneter di tingkat internasional. Serangkaian krisis keuangan yang sedang berlangsung, dampak pandemi COVID-19, dan intensifikasi ketegangan antar negara telah mendorong berbagai pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran negara dalam upaya menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Kebijakan fiskal ekspansif ini biasanya disertai dengan peningkatan pembiayaan, baik melalui penjualan obligasi pemerintah maupun penggunaan pinjaman luar negeri. Lonjakan signifikan dalam tingkat utang ini tidak hanya dialami oleh negara-negara maju dengan kapasitas fiskal dan stabilitas yang lebih memadai, tetapi juga meluas ke negara-negara berkembang dengan ruang fiskal yang lebih terbatas dan kerentanan struktural yang lebih besar. Oleh karena itu, isu keberlanjutan utang semakin menonjol dalam diskusi makroekonomi saat ini mengingat dampaknya yang komprehensif terhadap ketahanan sistem keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.(Grittayaphong & Echavarria, 2022)

Masalah utang yang dihadapi negara berkembang jauh lebih kompleks daripada yang dihadapi negara maju. Secara umum, negara berkembang harus mengatasi berbagai tantangan struktural yang lebih mendasar. Tantangan-tantangan ini meliputi basis pajak yang terbatas, efisiensi yang rendah dalam pengelolaan pendapatan negara, struktur ekonomi yang kurang terdiversifikasi, dan ketergantungan yang tinggi pada komoditas ekspor yang

sensitif terhadap fluktuasi harga di pasar internasional. Fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang, terutama yang bergantung pada ekspor, seperti Indonesia (Putrandito & Rohmah, 2025). Kondisi-kondisi ini membatasi kemampuan negara berkembang untuk menghasilkan pendapatan fiskal yang cukup. Hal ini, pada gilirannya, menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran publik dan membayar kewajiban utang mereka yang terus meningkat (Essl et al., 2019).

Dalam kerangka perekonomian terbuka, fluktuasi kebijakan ekonomi dunia dan dinamika perdagangan global berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi domestik serta kebutuhan anggaran pemerintah. Saat menghadapi guncangan eksternal atau lonjakan permintaan pembangunan dalam negeri, pemerintah biasanya menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan menaikkan belanja negara atau memanfaatkan berbagai instrumen utang. Hal ini selaras dengan temuan (Taufiqurrachman & Handoyo, 2021), yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi serta perdagangan internasional berdampak pada perekonomian nasional, sehingga memengaruhi strategi pembiayaan pemerintah guna mempertahankan kestabilan fiskal.

Indonesia sebagai negara berkembang dan dengan skala ekonomi ekonomi di Asia Tenggara juga tidak terlepas dari berbagai tantangan kebijakan fiskal, kenaikan belanja pemerintah dan pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor prioritas terutama dalam pembangunan infrastruktur atau pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan memerlukan ketersediaan sumber pembiayaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini berkaitan dengan kebijakan

pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi dengan kebijakan fiskal dan dengan stimulus besar, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan utang pemerintah sebagai konsekuensi dari pembiayaan defisit anggaran (Kusuma et al., 2025).

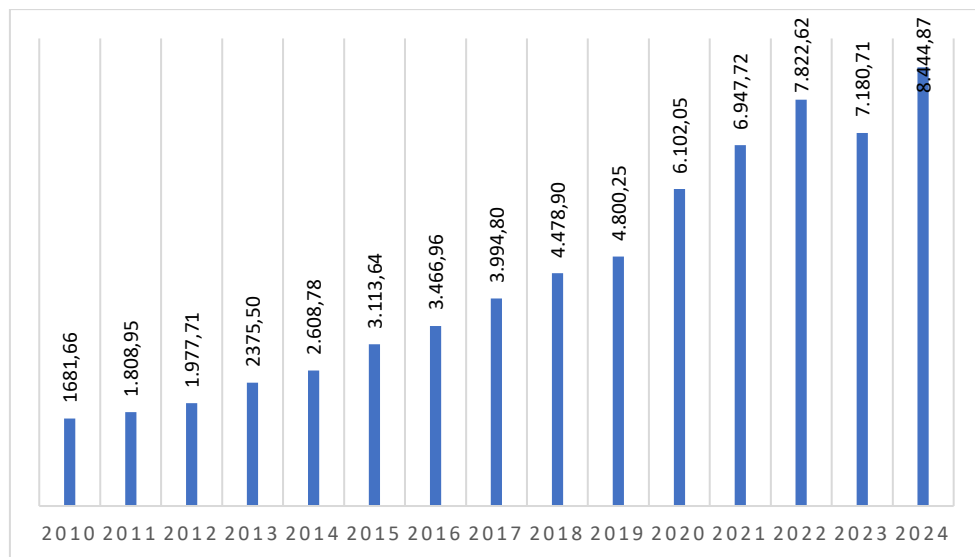
Kementerian keuangan dibawah kepemimpinan menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menarik utang baru sebesar Rp. 127,3 Triliun pada Januari 2026 sebagai bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang ini diambil untuk membiayai defisit anggaran pada awal tahun dan menjaga ketersediaan kas pemerintah untuk mendukung program pembangunan dan pengeluaran negara. Meskipun demikian, penarikan utang selama periode ini lebih rendah daripada tahun lalu. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola utang secara lebih terukur, terkendali dan bertanggung jawab (Madjid, 2026)

Menurut data kementerian keuangan, jatuh tempo utang di akhir tahun ini mencapai Rp.833,97 triliun. Angka ini berarti pemerintah harus menyediakan dana rata-rata Rp.2,28 triliun setiap hari untuk memenuhi kewajiban tersebut. Muhammad Andri Pradana, ekonom di *Bright Institute*, memperingatkan kesulitan dalam mengendalikan defisit neraca primer. Andri menjelaskan bahwa tekanan pada pembayaran utang meningkat, terutama dengan munculnya berbagai program baru. Program-program tersebut meliputi perbaikan atap, pembayaran iuran Dewan Perdamaian, pembayaran utang untuk proyek kereta cepat. Dan perluasan program pangan bergizi gratis. Selain itu, kondisi likuiditas di awal tahun menghadirkan tantangan tambahan. Pemerintah mengambil langkah untuk menarik deposito BUMN senilai Rp. 50 triliun dari bank-bank Hibrida tersebut, diikuti dengan

penerbitan surat utang swasta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan (Masitoh, 2026).

Utang pemerintah adalah instrumen pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran negara ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk menutupi seluruh pengeluaran. Defisit ini timbul dari kesenjangan antara pendapatan negara yang meliputi pajak dan penerimaan lainnya dan pengeluaran pada sektor prioritas dalam pembangunan infrastruktur atau pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, perlindungan sosial, dan pertahanan. Dalam konteks kebijakan fiskal, utang tidak selalu dipandang negatif, utang harus dikelola dengan bijak dan diarahkan pada kegiatan produktif yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi (Nesria et al., 2024).

Selama kurun waktu 2010-2024, utang pemerintah mengalami tren peningkatan, didorong oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kondisi ekonomi global, khususnya dampak pandemi. Peningkatan pengeluaran pemerintah selama resesi ekonomi dapat berfungsi sebagai stimulus untuk meningkatkan permintaan agregat. Namun kebijakan tersebut sering kali membutuhkan pembiayaan tambahan melalui utang. Perkembangan utang juga dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar dan suku bunga, karena kedua faktor ini menentukan besarnya beban pembayaran kembali dan biaya pinjaman pemerintah (Pratomo & Fadjar, 2024).

Gambar 1. 1 Utang Pemerintah Indonesia tahun 2010-2024 (Triliun)

Sumber : ECIC, DJPPR (2024)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, mengindikasikan bahwa utang pemerintah Indonesia mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010 hingga 2024. Utang pemerintah Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2010 utang pemerintah tercatat sebesar 1.681,66 triliun. Angka ini kemudian meningkat menjadi 1.808,95 triliun pada tahun 2011 dan kembali naik 1.977,71 triliun pada tahun 2012. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2013 dengan nilai utang mencapai 2.375,50 triliun. Secara nominal, dalam kurun waktu empat tahun utang pemerintah meningkat sekitar 694,84 triliun atau sebesar 40% dibandingkan posisi tahun 2010. Pada tahun 2014, jumlah utang berada pada kisaran 2.608,78 triliun, dan kemudian secara perlahan meningkat hingga menyentuh angka 4.800,25 triliun pada tahun 2019. Pola ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Lonjakan utang pemerintah yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 sampai 2022, dimana utang melonjak secara signifikan hingga mencapai 7.822,62 triliun. Lonjakan ini tidak terlepas dari membengkaknya pengeluaran

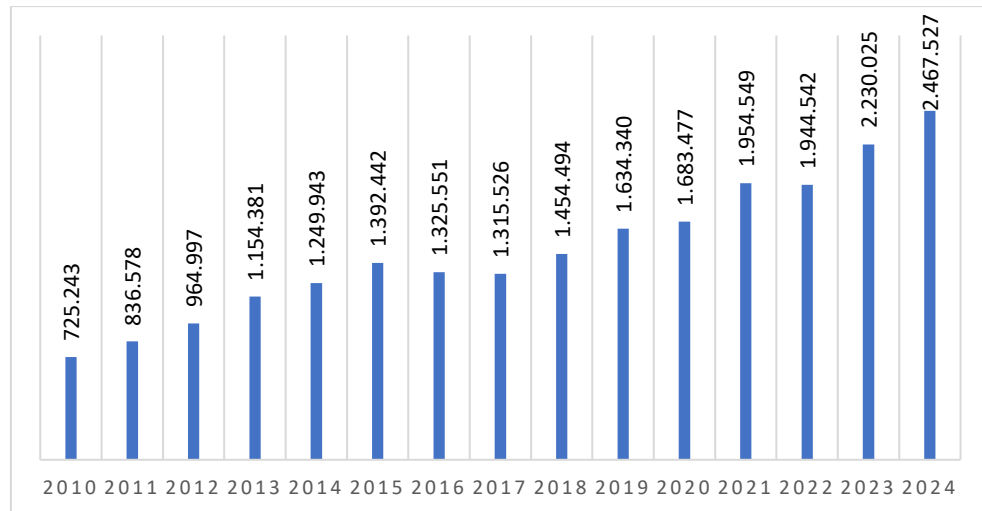
negara khususnya saat upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 di kisaran 7.180,71 triliun, utang kembali melonjak pada tahun 2024 menjadi 8.444,87 triliun rupiah. Secara garis besar, grafik tersebut menggambarkan tren peningkatan utang pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun. Fenomena tersebut menjadikan alasan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pertumbuhan utang serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kondisi fiskal negara.

Belanja pemerintah menjadi salah satu alat utama dalam kebijakan fiskal yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus merespon fluktuasi dalam siklus bisnis. Dalam perspektif teori keynesian yang di perkenalkan John Maynard Keynes, peningkatan pengeluaran negara dapat memperbesar permintaan agregat, mendorong kenaikan output nasional, serta menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) di dalam perekonomian. Pandangan ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah dalam memobilisasi kegiatan ekonomi melalui belanja publik yang di rancang secara terstruktur dan tepat sasaran, terutama dalam konsumsi rumah tangga dan investasi swasta (Wahyudi, 2020).

Sependapat dengan penelitian (Qadri, 2022) menunjukkan bahwa belanja pemerintah memberikan pengaruh signifikan terhadap utang luar negeri sekaligus terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, apabila tidak disertai dengan peningkatan penerimaan negara yang memadai, berpotensi memperbesar kebutuhan pembiayaan melalui penambahan utang. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan fiskal yang baik dan seimbang antara upaya

pemberian dorongan ekonomi dan kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Gambar 1. 2 Belanja Pemerintah Tahun 2010-2024 (Miliar)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2026)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada tahun 2010 – 2024. Secara umum, terlihat bahwa belanja pemerintah mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data di atas belanja pemerintah Indonesia mengalami peningkatan yang spesifik sepanjang tahun 2010 hingga 2013. Dimulai dari 725.243 miliar pada tahun 2010, anggaran belanja pemerintah terus mengalami kenaikan menjadi 836.574 miliar pada tahun 2011, kemudian 964.977 miliar pada tahun 2012. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2013 dengan realisasi belanja sebesar 1.154.381 miliar. Meskipun sempat mengalami tren fluktuasi pada awal periode dari tahun 2014 – 2018. Pada tahun 2014 belanja pemerintah berada di kisaran 1.249.943 (dalam satuan miliar). Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1.392.442 (dalam satuan miliar), namun pada tahun 2016 angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1.325.55 (dalam satuan miliar), dan relatif stabil pada tahun 2017. Pada saat memasuki tahun 2018 hingga 2020, belanja

pemerintah mengalami peningkatan yang cukup konsisten yaitu pada tahun 2018 sebesar 1.454.494 (dalam satuan miliar) dan pada tahun 2019 sebesar 1.634.340 (dalam satuan miliar) dan pada saat tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan sebesar 1.683.447 (dalam satuan miliar).

Peningkatan belanja pemerintah yang terlihat lebih signifikan yaitu pada saat setelah tahun 2020, terutama pada rentang tahun 2021-2024. Pada 2021 belanja pemerintah terlihat mengalami peningkatan sebesar 1.954.549 (dalam satuan miliar), dan kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 1.944.542 (dalam satuan miliar), dan terus naik hingga 2.230.025 (dalam satuan miliar) pada tahun 2023 serta mengalami peningkatan sebesar 2.467.527 (dalam satuan miliar) pada tahun 2024. Pertumbuhan pesat terjadi setelah tahun 2020 kemungkinan berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pasca pandemi covid 19, terutama pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus ekonomi.

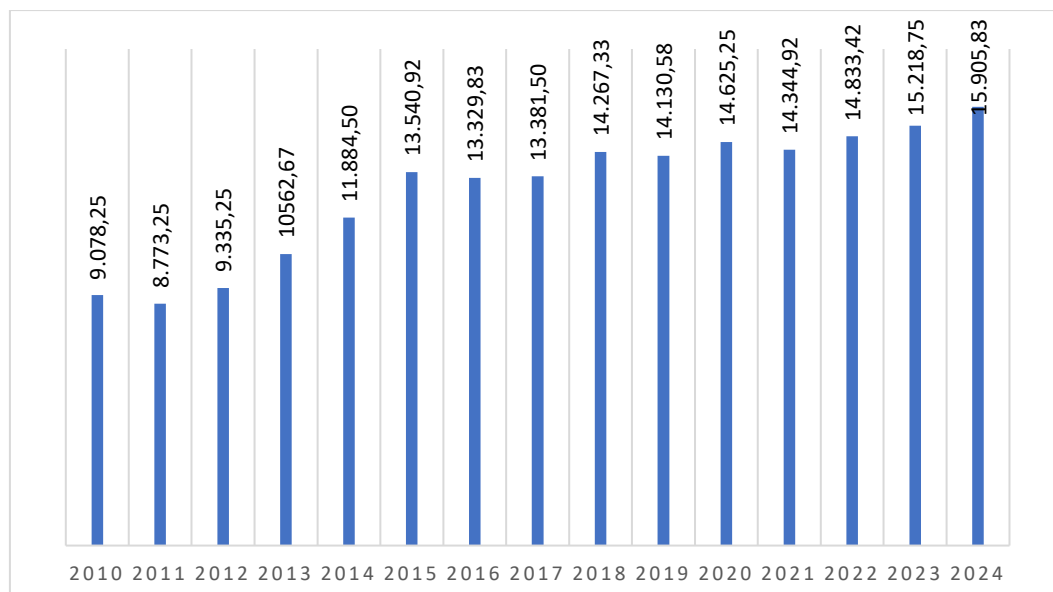
Secara menyeluruh, grafik belanja pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam 10 tahun terakhir cenderung ekspansif, dengan pembagian belanja yang terus meningkat dan bertambah. Tren tersebut menunjukkan peran aktif pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peningkatan pengeluaran negara.

Nilai tukar menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika utang pemerintah, terutama yang berhubungan dengan kewajiban luar negeri dalam kelompok mata uang asing. Fluktuasi pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara langsung dapat memengaruhi besarnya beban

pembayaran utang dalam rupiah, khususnya ketika terjadi depresiasi yang signifikan (Nugraha et al., 2021).

Penelitian dari (A. U. Putri et al., 2023) menyatakan bahwa dinamika nilai tukar rupiah dalam periode 2020-2023 dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, baik dalam negeri maupun global. Beberapa aspek dari sisi dalam negeri yaitu, inflasi dan neraca transaksi berjalan menjadi penentu penting, sementara dari aspek global, kebijakan moneter Amerika Serikat serta sentimen risiko investor global juga turut mempengaruhi pergerakan kurs. Depresiasi nilai tukar berpotensi meningkatkan nilai kewajiban utang yang dicatat dalam denominasi valuta asing secara otomatis tanpa adanya tambahan utang atau pinjaman baru, sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi fiskal pemerintah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas nilai tukar memiliki dampak yang nyata dalam stabilitas nilai tukar memiliki dampak yang nyata terhadap utang negara.

Gambar 1. 3 Nilai Tukar Rupiah Tahun 2010-2024 (Rupiah)



Sumber : Satu Data Perdagangan (2026)

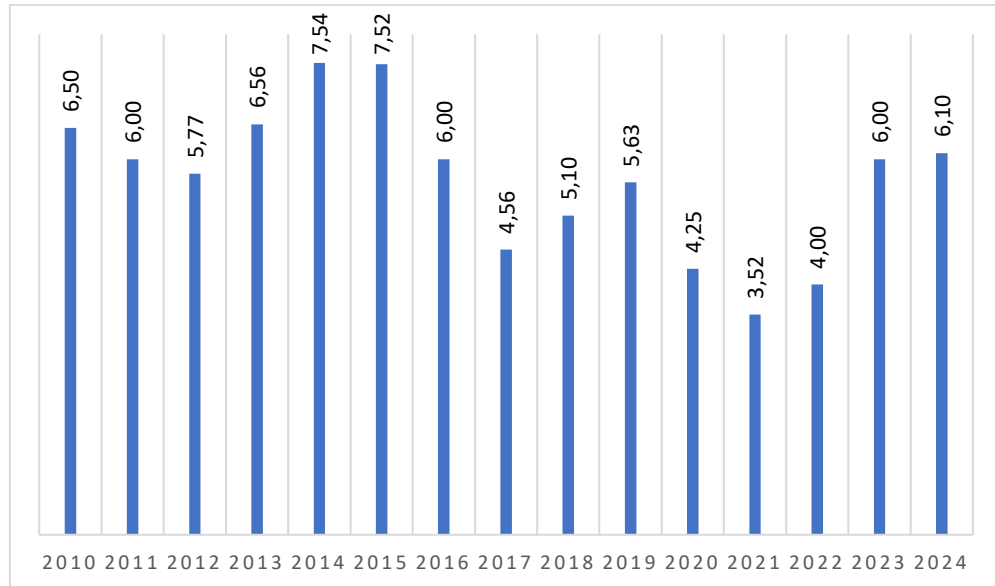
Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa grafik Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam periode 2010 – 2024. Secara keseluruhan terlihat bahwa nilai tukar cenderung mengalami tren melemah dalam jangka waktu 2010 - 2024, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada periode 2013, nilai tukar rupiah menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung melemah pada periode akhir. Pada tahun 2010 nilai tukar tercatat sebesar Rp 9.078 kemudian mengalami apresiasi di tahun 2011 menjadi Rp 8.773 per dolar AS. Kondisi ini mencerminkan relatif stabilnya fundamental ekonomi domestik serta arus modal masuk yang cukup kuat pada periode tersebut. Namun, pada tahun 2012 nilai tukar menjadi kembali mengalami depresiasi menjadi Rp 9.335 dan tahun 2013 juga mengalami depresiasi yang cukup signifikan hingga mencapai Rp 10.562, depresiasi ini menunjukkan adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.

Pada tahun 2014, nilai tukar berada di kisaran Rp.11.884 terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2015 rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga di kisaran Rp.13.540. pada tahun 2016 dan tahun 2017 nilai tukar rupiah relatif stabil dan berada di kisaran Rp.13.329 – Rp. 13.381. kemudian memasuki tahun 2018. Pada saat memasuki tahun 2018, rupiah kembali terdepresiasi menjadi sekitar Rp.14.267 dan tetap berada di atas Rp.14.00 di tahun 2019 dan 2020. Pada saat 2021 sempat sedikit menguat di sekitar Rp. 14.344, namun kembali melemah di tahun 2022 hingga di angka Rp. 14.833. Tren depresiasi berlanjut di tahun tahun berikutnya yaitu di tahun 2023 dan 2024 dengan nilai tukar mencapai Rp.15.218 dan Rp.15.905 per dolar Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami kecenderungan melemah dalam jangka waktu yang cukup panjang, yang tercermin dari tahun 2010 sampai 2024, dari angka kurs Rp. 9.078 per dolar Amerika Serikat dan terdepresiasi sampai sekitar Rp. 15.905 per dolar Amerika Serikat. Perubahan ini menggambarkan dinamika kondisi ekonomi domestik dan global yang mempengaruhi stabilitas mata uang, serta menunjukkan bahwa nilai tukar merupakan indikator penting dalam menilai ketahanan ekonomi.

Suku bunga sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter memiliki peran utama terhadap besaran biaya pinjaman yang di tanggung pemerintah baik di dalam skala pasar domestik maupun pasar internasional. Peningkatan suku bunga acuan yang di tetapkan bank Indonesia akan berdampak pada naiknya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, dan secara otomatis akan berdampak pada bertambahnya beban pembayaran bunga yang harus di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penelitian yang dilakukan (Afandi, 2022) menunjukkan bahwa suku bunga memiliki dampak yang signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang. Dengan demikian setiap kenaikan suku bunga berpotensi mendorong meningkatnya utang yang lebih tinggi karena mahalanya biaya refinancing. Sejalan dengan itu (Jannah et al., 2025) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa suku bunga dan nilai tukar secara simultan mempengaruhi tingkat utang luar negeri pada periode 2014-2018. Temuan tersebut menegaskan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara kebijakan moneter dan pengelolaan utang pemerintah yang efektif.

Gambar 1. 4 Suku Bunga Tahun 2010-2024 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2026)

Berdasarkan grafik pada gambar 1.4 perkembangan suku bunga periode 2010-2024, menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga di Indonesia mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2010, suku bunga tercatat 6,50%. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 6,00% pada tahun 2011 dan kembali turun menjadi 5,77 persen pada tahun 2012. Penurunan suku bunga pada periode tersebut mencerminkan kebijakan moneter yang cenderung akomodatif guna mendorong perubahan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi pasca dampak krisis global. Namun demikian, pada tahun 2013 suku bunga kembali mengalami peningkatan menjadi 6,56%.

Pada tahun 2014 dan 2015, suku bunga berada pada level yang relatif tinggi di banding 10 tahun ke depan, yaitu di angka 7,54% dan 7,52%. Kondisi ini menandakan kebijakan moneter yang ketat, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan tekanan inflasi. Namun setelah itu, suku bunga mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai di titik terendah pada tahun 2021 di angka 3,52%. Penurunan ini tidak terlepas dari upaya otoritas

moneter dalam mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi covid-19. Memasuki periode 2022 sampai 2024 suku bunga mengalami kenaikan dan berada di angka 6,00% di tahun 2023 dan 6,10% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan inflasi global, normalisasi kebijakan moneter, serta adanya upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Kondisi suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan utang pemerintah. Ketika suku bunga naik dapat berpotensi menambah beban bunga utang, sedangkan penurunan suku bunga memberi peluang bagi pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian melihat fluktuasi suku bunga selama sepuluh tahun terakhir menjadi aspek yang perlu untuk di analisis, agar dapat memahami sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan utang pemerintah di Indonesia (Fadillah & Sutjipto, 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya pada umumnya menganalisis pengaruh nilai tukar, suku bunga, terhadap utang luar negeri secara terpisah atau dengan jumlah variabel yang relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan (Jannah et al., 2025) memfokuskan penelitian pada periode waktu 2014-2018 dengan menambahkan variabel inflasi sebagai faktor makroekonomi yang memiliki pengaruh terhadap dinamika utang luar negeri, namun demikian model yang digunakan belum secara eksplisit belum memasukkan belanja pemerintah sebagai variabel yang diteliti, sehingga hubungan antara kebijakan fiskal dan perkembangan utang belum tergambarkan secara menyeluruh.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Qadri, 2022) telah memasukkan belanja pemerintah dan defisit anggaran dalam analisisnya, namun ruang lingkupnya masih berfokus pada utang luar negeri dan belum

menyentuh total utang pemerintah secara menyeluruh. Berbagai keterbatasan ini mengindikasikan masih terdapat peluang untuk melakukan penelitian yang menganalisis secara simultan pengaruh belanja, nilai tukar, dan suku bunga terhadap total utang pemerintah Indonesia dengan rentang waktu yang lebih luas. Research gap penelitian yang teridentifikasi ini menjadikan dasar konseptual sekaligus alasan akademik yang valid bagi pelaksanaan dan pengembangan kajian yang lebih komprehensif serta terbaru.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional Indonesia dalam jangka panjang. Peningkatan utang yang tidak terkendali tanpa didasari kapasitas pembayaran yang memadai berpotensi menimbulkan ancaman dan risiko stabilitas fiskal, mulai dari penyempitan ruang kebijakan hingga kemungkinan krisis utang yang mengancam stabilitas makro ekonomi. Untuk itu, diperlukan kajian empiris yang komprehensif, akurat, dan terkini untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan terkait.

Penelitian yang dilakukan (Aini, 2025) menegaskan bahwa koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan persyaratan fundamental dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menarik investasi produktif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan evaluasi bagi kebijakan pengelolaan utang pemerintah Indonesia ke depan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah belanja pemerintah berpengaruh terhadap utang pemerintah di Indonesia periode 2010-2024?

2. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap utang pemerintah di Indonesia periode 2010-2024?
3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap utang pemerintah di Indonesia periode 2010-2024?
4. Apakah belanja pemerintah, nilai tukar, dan suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap utang pemerintah di Indonesia periode 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap utang pemerintah di Indonesia periode 2010-2024.
2. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap utang pemerintah di Indonesia periode 2010-2024.
3. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap utang pemerintah Indonesia periode 2010-2024.
4. Menguji pengaruh belanja pemerintah, nilai tukar, dan suku bunga secara simultan terhadap utang pemerintah periode 2010-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap perkembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang ekonomi publik dan makro ekonomi. Lebih spesifik lagi studi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika utang

pemerintah di Indonesia, baik dalam segi fiskal maupun variabel makro ekonomi lainnya. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur empiris yang relevan dengan pengelolaan utang pemerintah negara berkembang dan menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji topik serupa dengan pendekatan dan periode waktu yang berbeda.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan dasar pertimbangan dan masukan bagi pemerintah serta otoritas moneter dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kesimpulannya studi ini dapat memberikan gambaran empiris tentang hubungan antara variabel ekonomi dan utang pemerintah, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga memastikan pengelolaan utang yang lebih bijaksana dan efektif, selaras dengan kapasitas fiskal nasional jangka panjang.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada penggunaan tiga variabel bebas, yaitu belanja pemerintah, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan suku bunga. Adapun variabel total utang pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai variabel terikat. Ruang lingkup waktu penelitian dibatasi pada tahun 2010 hingga 2024 dengan memanfaatkan data sekunder dari lembaga resmi. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa data yang dianalisis akurat dan mencerminkan kondisi ekonomi aktual dan yang sebenarnya. Indonesia di pilih sebagai fokus karena posisinya memiliki dinamika fiskal dan moneter yang cukup kompleks.